



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

**BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN**

Tim Penyusun

Kepala BRPPUPP

Kepala Subbagian Umum / Ketua Tim Kerja Manajerial

Ketua Tim Kerja Penyuluhan

Acim Tirtana, SE

Lisnawati, SE

Rian Ariadi Harahap, S.AP

Muthia Nurlestari Putri, S.Pi

Arismansyah, S.Pi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BRPPUPP Tahun 2025. LKjIP BRPPUPP Tahun 2025 disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban BRPPUPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja BRPPUPP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan kegiatan manajerial dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil-hasil penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Palembang, 21 Januari 2026
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rezki Antoni S, S.Kel

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan	3
1.3 Tugas dan Fungsi.....	3
1.4 Keragaan SDM BRPPUPP.....	5
1.5 Sistematika Laporan Kerja	6
1.6 Potensi dan Permasalahan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kerja Tahunan	17
2.3 Perjanjian Kinerja.....	18
2.4 Pengukuran Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Tahun 2025	23
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	49
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP Tahun 2025	54
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Capaian Kinerja Utama	57
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Output dan pagu anggaran 2025	17
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusluh KP	18
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	24
Tabel 4. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok)	25
Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok)	26
Tabel 6. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	27
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung	28
Tabel 8. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	28
Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	29
Tabel 10. Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP BRPPUPP (Unit)	30
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan	30
Tabel 12. Capaian IKU Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Miliar)	31
Tabel 13. Rincian PNBP dari Surat Dinas Penyampaian PNBP BPPSDM KP	32
Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU Nilai PNBP Satker BRPPUPP dengan Satminkal Lain	33
Tabel 15. Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	34
Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan	34
Tabel 17. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	34
Tabel 18. Perbandingan Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus	35
Tabel 19. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	35
Tabel 20. Perbandingan Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang	36
Tabel 21. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPPUPP (Dokumen)	37
Tabel 22. Perbandingan Capaian IKU Kemitraan yang Disepakati dan/atau	38
Tabel 23. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%)	38
Tabel 24. Perbandingan Capaian Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Satminkal Lain	39
Tabel 25. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	40
Tabel 26. Perbandingan Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (nilai) dengan Satminkal Lain	40
Tabel 27. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	41
Tabel 28. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP 2025	42
Tabel 29. Perbandingan Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai) dengan Satminkal Lain	42
Tabel 30. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	43
Tabel 31. Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai) dengan Satminkal Lain	44
Tabel 32. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)	45
Tabel 33. Perbandingan Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks) dengan Satminkal Lain	45
Tabel 34. Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	47
Tabel 35. Perbandingan Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ	47
Tabel 36. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	48

Tabel 37. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%) dengan satminkal lain	49
Tabel 38. Realisasi Anggaran BRPPUPP Tahun 2025	50
Tabel 39. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Per IKU.....	51

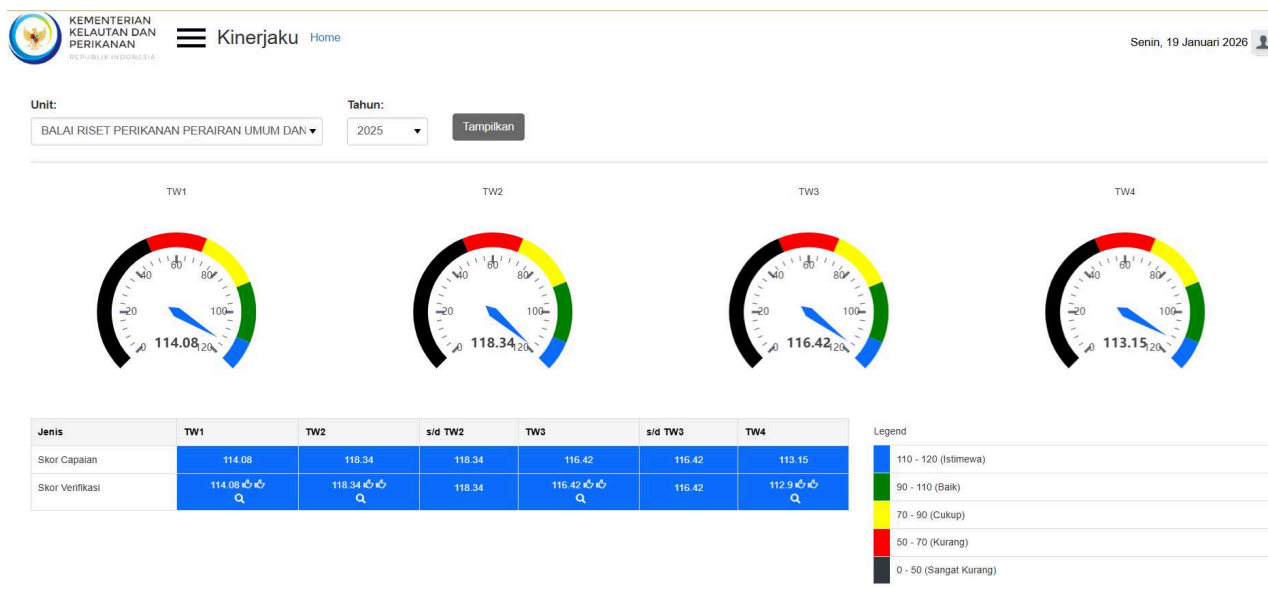
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP	4
Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Tahun 2025.....	5
Gambar 3. Sasaran Kegiatan BRPPUPP tahun 2025	16
Gambar 4. Dashboard Kinerja Tahun 2025 BRPPUPP.	23
Gambar 5. Dashboard Kinerja Tahun 2025 BRPPUPP	57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPPSDM KP 2020-2024, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-1 yaitu merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten.

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Tahun 2025 sebesar 113,15%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Sumber: Dashboard Aplikasi Kinerja BRPPUPP

Pada Tahun 2025 terdapat 16 IKU BRPPUPP yang telah mencapai target sehingga 9 IKU berstatus biru dan 7 IKU berstatus hijau, IKU yang telah tercapai yaitu:

1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok) dengan capaian di Tahun 2025 sebanyak 3.711 Kelompok dengan target sebanyak 3.430 Kelompok dengan persentase sebesar 108,19%
2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 160 kelompok dari target Tahun 2025 sebanyak 149 kelompok dengan persentase sebesar 107,38%.

3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai 465 kelompok dari target Tahun 2025 sebanyak 442 kelompok dengan persentase sebesar 105,20%.
4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP BRPPUPP (Unit) tercapai sebanyak 36 Unit dengan target 28 Unit dan persentase sebesar 120%
5. Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar) tercapai 0,0413 (0,04 di aplikasi kinerjaku) dari target Tahun 2025 sebesar 0,0399 dengan persentase sebesar 103,54%.
6. Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket) memiliki capaian sebanyak 2 paket dengan target di Tahun 2025 sebanyak 1 paket dengan persentase 120%.
7. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang) di Tahun 2025 mempunyai capaian sebanyak 3 orang yang lulus penilaian kompetensi dari target 2 orang di Tahun 2025 dengan persentase sebesar 120%.
8. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang) di Tahun 2025 mempunyai capaian sebanyak 23 orang yang lulus pelatihan teknis dari target 19 orang di Tahun 2025 dengan persentase sebesar 120%.
9. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPPUPP (Dokumen) di Tahun 2025 mendapat capaian sebanyak 2 kemitraan dari target sebanyak 1 kemitraan dengan persentase 120%.
10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target sebesar 85% dengan persentase capaian 117,65%.
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai) tercapai sebesar 99,72 dengan target di TW IV 2025 sebesar 92 dengan persentase sebanyak 108,39%.
12. Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai) tercapai dengan nilai 84,40 dari target yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar 80 dan persentase capaian 105,50%
13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai) tercapai sebesar 100 dari target yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar 71,5 dan persentase capaian 120%
14. Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks) tercapai sebesar 83,35 dengan target Tahun 2025 sebesar 81 dan persentase capaian sebesar 102,90%
15. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 80% dengan persentase capaian 120%.
16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 80% dengan persentase capaian 120%.

Capaian Indikator Kinerja Utama BRPPUPP Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TA. 2025		%
				TARGET	CAPAIAN	
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok)	3.430	3.711	108,19
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	149	160	107,38
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	442	465	105,20
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP BRPPUPP (Unit)	28	36	120
		5	Nilai PNPB Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	0,0399 (0,04 di aplikasi kinerjaku)	0,0413 (0,04 di aplikasi kinerjaku)	103,54
		6	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	1	2	120
		7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	2	3	120
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	19	23	120
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPPUPP (Dokumen)	1	2	120
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85	100	117,65
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	92	99,72	108,39
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	80	84,40	105,50
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	71,5	100	120
		14	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	81	83,35	102,90
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80	100	120
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	80	100	120

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, Tahun 2025

Secara umum kinerja BRPPUPP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Belum terbitnya nomenklatur organisasi dan tata kerja BRPPUPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP.
2. Dalam pencapaian IKU Penyuluhan masih banyak kendala seperti kurangnya jumlah penyuluh jika dibandingkan dengan target jumlah pelaku utama yang akan disuluh,

penyusunan Profil Kelompok yang dibuat masih ada yang belum sesuai dengan format dan tidak sesuai dengan kondisi update.

3. Proses pencapaian IKU Kelompok yang ditingkatkan kelas cenderung membutuhkan waktu yang tidak singkat dan proses yang panjang karena melibatkan banyak pihak .

Secara umum Kinerja BRPPUPP pada tahun 2025 berjalan dengan baik, namun demikian untuk memastikan capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal pada Tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM KP maupun Pusat terkait informasi nomenklatur organisasi, tata kerja, serta tugas pokok dan fungsi balai yang baru, dan menyampaikan progresnya di internal BRPPUPP secara berkala melalui kegiatan apel pagi maupun kegiatan koordinasi lainnya.
2. Menerapkan komitmen Bersama dalam pemenuhan target pencapaian IKU dengan dialog kinerja antara satminkal dan penyuluh perikanan agar profil kelompok yang disampaikan sesuai dengan format di perka BPPSDM dan sesuai batas waktu penyampaian
3. Menginventarisir calon kelompok yang akan ditingkatkan serta pengembangan Kompetensi dan Mindset Kelompok supaya lebih mandiri

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRPPUPP, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkup BRPPUPP. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BRPPUPP Tahun 2025 sebesar Rp. 79,229,871,535,- atau 99,85% dari pagu anggaran Rp. 79,348,679,000,-

BAB I

PENDAHULUAN

01

LATAR BELAKANG

02

TUJUAN

03

TUGAS DAN FUNGSI

04

KERAGAAN SDM BRPPUPP

05

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

06

POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan ke-empat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan KP (Pusluh) tahun 2020-2024, di mana mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi KKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BPPSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BPPSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui pengembangan SDM.

Penyusunan Rencana Strategis BRPPUPP dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur pembentukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) dan didalamnya juga mengatur tentang pembentukan PUSLUHKP dan BRPPUPP.

BRPPUPP telah berdiri sejak tahun 1969, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas BRPPUPP adalah melaksanakan kegiatan maju dan penyuluhan di 5 (lima) provinsi yaitu provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung dengan jumlah penyuluh sebanyak 466 orang. Pelaksanaan riset meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjiran, ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan. Kegiatan riset dan penyuluhan BRPPUPP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP.176/MEN/KU.611/2017 tanggal 22 Desember 2016.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BRPPUPP ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Kinerja BRPPUPP pada Tahun 2025.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPPUPP untuk meningkatkan Kinerjanya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 73/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Perikanan. Institusi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Penyuluhan Perikanan yang meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugasnya, BRPPUPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang riset perikanan perairan umum dan penyuluh perikanan;
2. Pelaksanaan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset Perikanan Perairan Umum Daratan;
4. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
6. Pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
8. Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

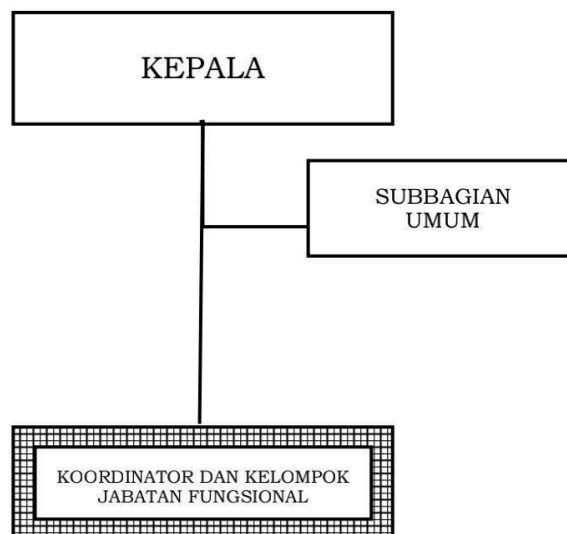
Keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP perlu dievaluasi, sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pasal 3, yaitu penyelenggaraan negara harus mengacu kepada azas proporsionalitas, profesional dan akuntabilitas.

Struktur organisasi BRPPUPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian umum dan kelompok fungsional, namun saat ini pasca penyetaraan jabatan struktural ke fungsional masih terdapat Subkoordinator dan Pelaksana yang sebelumnya merupakan pejabat struktural eselon IV dan V yaitu:

Subkoordinator Tata Usaha, Subkoordinator Tata Operasional, dan Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana, serta Subkoordinator Penyuluhan. Subkoordinator Tata Usaha terdiri atas Pelaksana Urusan Keuangan dan Umum dan Pelaksana Urusan Kepegawaian, Subkoordinator Tata Operasional terdiri dari Pelaksana urusan Program dan Anggaran dan Pelaksana Monitoring dan Evaluasi, Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana terdiri atas Pelaksana Urusan Pelayanan Teknis dan Pelaksana Urusan Prasarana dan Sarana, dan Subkoordinator Penyuluhan terdiri atas Pelaksana urusan Kelembagaan Kelompok dan Pelaksana urusan Penyelenggaraan

Struktur organisasi BRPPUPP tersaji dalam gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP

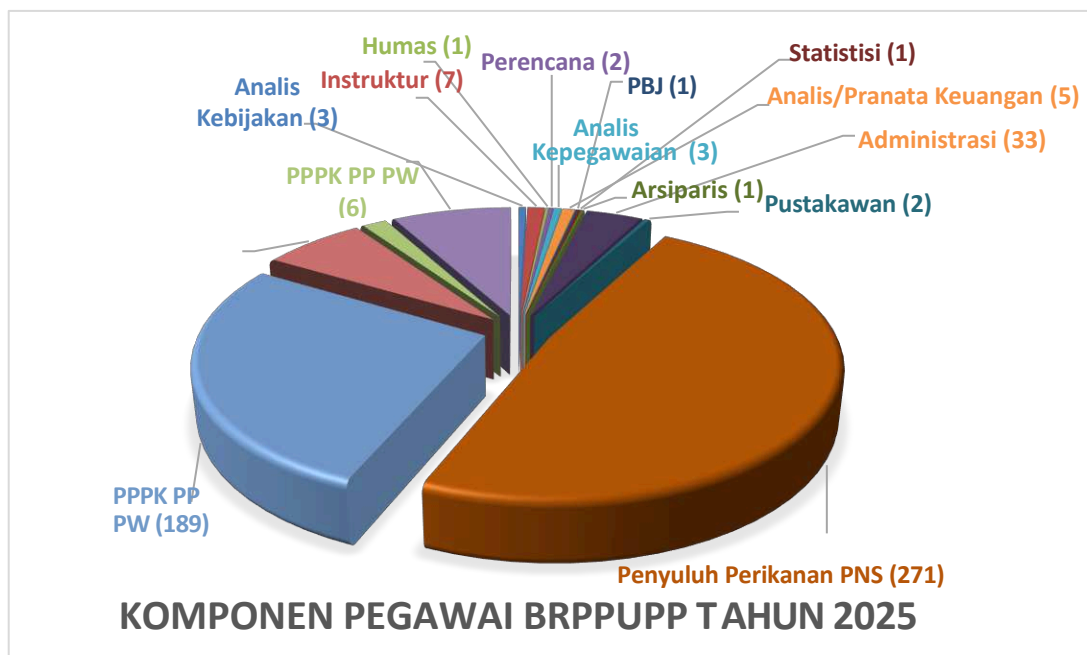
Berdasarkan Surat Tugas Nomor B. 833/BRSDM-BRPPUPP/KP.440/VIII/2023, Kepala BRPPUPP dibantu oleh 2 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Manajerial dan Tim Kerja Penyuluhan untuk mewujudkan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan uraian fungsi dan tugas sebagai berikut :

1. Rincian pelaksanaan kegiatan manajerial dan penyuluhan tersusun rapi
2. Peran anggota Tim Kerja terbagi sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan
3. Kegiatan sesuai dengan perencanaan
4. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota Tim Kerja
5. Tersusunnya hasil kinerja anggota timnya kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan
6. Terlaksananya kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antara anggota Tim Kerja

1.4 Keragaan SDM BRPPUPP

BRPPUPP Palembang dikepalai oleh seorang Kepala Balai (Eselon III), 1 Kasubbag Umum. Saat ini BRPPUPP didukung oleh 516 Pegawai terdiri atas terdiri atas 3 orang Analis Kebijakan, 7 orang Instruktur, 1 orang Humas, 2 orang Perencanaan, 3 orang Analis Kepegawaian, 5 orang Analis/Pranata Keuangan, 1 orang PBJ, 1 orang Statistisi, 1 orang Arsiparis, 33 orang tenaga Administrasi, 2 orang Pustakawan, 271 orang Penyuluh Perikanan PNS, 189 orang PPPK Penyuluh Perikanan Penuh Waktu, 6 orang PPPK Penyuluh Perikanan Paruh Waktu.

Jumlah pegawai BRPPUPP tersaji dalam grafik dibawah ini:



Sumber: Data Keragaan Pegawai BRPPUPP Tahun 2025

Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Tahun 2025

1.5 Sistematika Laporan Kerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2025.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BRPPUPP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPSDM
3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis BRPPUPP 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BRPPUPP Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja Tahun 2025.
4. Bab IV Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.

1.6 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan sektor usaha perikanan, sentra pendaratan hasil perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Sementara itu nilai produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari nilai produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Produksi perikanan tangkap diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dalam rangka pemenuhan protein hewani sebagai sumber gizi masyarakat yang berkualitas. Untuk komoditas tertentu juga mendukung peningkatan devisa negara melalui ekspor.

Total data produksi yang disajikan dalam kerangka laporan produksi perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari data perolehan survei dan estimasi Dirjen Perikanan Tangkap. Hasil menggambarkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena dominasi data masih merupakan kontribusi besar sektor tangkap perikanan laut. Kenaikan volume produksi perikanan tangkap periode 2010-2014 rata-rata sebesar 4,52% per tahun, yaitu 5.384.418 ton pada tahun 2010 menjadi 6.200.180 ton pada tahun 2014. Produksi tetap didominasi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 5.779.990 (93,22%) sedangkan produksi

perikanan tangkap di perairan umum daratan sebesar 420.190 (7,27%).

Sementara itu, capaian nilai produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar Rp 108,53 triliun, terdiri dari nilai produksi perikanan tangkap di laut sebesar Rp 99,90 triliun dan perairan umum daratan sebesar Rp 8,62 triliun. Nilai produksi perikanan tangkap selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,60% per tahun. Kenaikan terbesar disumbangkan dari perikanan tangkap di perairan laut.

Terus meningkatnya hasil produksi tangkap sektor perikanan pedalaman/ perairan umum dengan rata-rata 9,52% pertahun menjadi perhatian khusus. Di mana perikanan perairan umum sangat tergantung dengan wilayah tangkap yang juga digunakan untuk banyak kepentingan. Kegiatan penangkapan lestari yang berbasis dengan kelestarian sumberdaya ikan menjadi konsen penting dalam keberlanjutan perikanan perairan umum itu sendiri.

Keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2017 terdapat 5.783 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 2.500 orang Penyuluh Perikanan bantu, 3.283 orang penyuluh PNS, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat. Terhitung mulai 01 Januari 2018 penyuluh perikanan secara administrasi dibagi menjadi 9 Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) yang tersebar di Indonesia.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN, dengan demikian fungsi BRPPUPP di bidang riset perikanan perairan umum daratan hilang dan berfokus di kegiatan manajerial dan Penyuluhan Perikanan.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset dan penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum terbitnya nomenklatur organisasi dan tata kerja BRPPUPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP.
- 2) Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan

Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BRPPUPP akan mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi.

- 3) Jumlah sebaran dan kompetensi penyuluh perikanan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan di lapang;
- 4) Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- 5) Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:
 - i. Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh;
 - ii. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya; Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
 - iii. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;
 - iv. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
 - v. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan, antara lain:

- i. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- ii. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
- iii. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai;
- iv. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
- v. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- vi. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- vii. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
- viii. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

01

RENCANA STRATEGIS

02

RENCANA KERJA TAHUNAN

03

PERJANJIAN KINERJA

04

PENGUKURAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, salah satunya adalah perairan umum daratan. Perairan umum di Indonesia tercatat seluas 54 juta ha, terdiri dari 12 juta ha sungai dan rawa, 2,1 juta ha danau (alami dan buatan), dan 39,9 juta ha perairan rawa pasang surut. Perairan umum mempunyai posisi strategis dan berfungsi serba guna, selain dimanfaatkan oleh sektor perikanan juga dimanfaatkan oleh sektor Pekerjaan Umum, perindustrian, pertambangan, kehutanan, pertanian, pariwisata, transmigrasi, perhubungan dan pemukiman (Ilyas *et al*, 1990).

Perairan umum daratan terdiri dari sungai, rawa (rawa banjiran, rawa gambut dan rawa pasang surut), estuaria, danau dan waduk serta genangan air lainnya. Sungai merupakan perairan yang mengalir (*lotic water*), memiliki karakteristik mengalir searah dari hulu ke hilir, aliran bagian hulu lebih deras dari pada yang hilir (Ewusie, 1990; Odum, 1993). Sungai-sungai besar banyak tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Keanekaragaman ikan di sungai cukup tinggi sebagai contoh di DAS Kapuas telah ditemukan lebih dari 300 jenis ikan, di DAS Barito lebih dari 110 jenis, sedangkan di DAS Musi lebih dari 200 jenis (Dudley, 1996; Husnah *et al.*, 2008). Tiap tipe ekosistem sungai bagian hulu, tengah dan hilir mempunyai jenis ikan yang khas. Jenis ikan khas di hulu sungai (*up-stream*) sebagai contoh ikan Semah (*Tor douronensis*), bagian tengah (*middle-stream*) yaitu ikan Belida (*Chitala lopis*), dan bagian hilir (*lower-stream*) yaitu Sembilang (*Paraplotosus albilabris*) (Utomo, *et al* 2007). Keanekaragaman jenis ikan penghuni sungai cukup tinggi, namun belum ada data yang akurat untuk mengungkapkan hal ini karena penelitian masih bersifat spasial.

Setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 2005-2009, pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada RPJMN II 2010-2014 semakin menjadi arus utama. Demikian pula dengan sub sektor perikanan tangkap di dalamnya, baik itu perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum daratan (PUD). Pelaksanaan pengarusutamaan tersebut mengacu kepada tema RPJMN II sebagaimana telah tercantum dalam RPJPN 2005-2025, yakni “memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, dan memperkuat daya saing perekonomian”. Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RPJMN dimaksud menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), dan diadopsi menjadi Renstra Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyuluh perikanan yang semula merupakan pegawai daerah dan terhitung bulan Juli 2017 telah dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat sebanyak 3.216 orang. Dan BRPPUPP Palembang memiliki penyuluh perikanan sebanyak 466 orang yang tersebar di 5 Provinsi yaitu

Sumatera Selatan sebanyak 158 orang Penyuluh Perikanan, Jambi sebanyak 68 Penyuluh Perikanan, Bangka Belitung sebanyak 45 orang Penyuluh Perikanan, Bengkulu sebanyak 99 orang Penyuluh Perikanan dan Lampung sebanyak 96 orang Penyuluh Perikanan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BRPPUPP akan mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi. Sampai Triwulan II, KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BRPPUPP masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 73/PERMEN-KP/2020. Namun demikian telah dilakukan penyesuaian dan review Renstra BRPPUPP yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BRPPUPP.

1. Visi

Dalam mendukung terwujudnya cita-cita nasional dengan kuatnya ketahanan pangan, tingkat kesejahteraan yang meningkat dari masyarakat diperlukan pembangunan fundamental berdasarkan kajian yang terukur dan dapat di implementasikan *stakeholder* perikanan. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagai salah satu instansi pelaksana dalam pengkajian sumberdaya dan pemanfaatan perikanan khususnya wilayah daratan bertanggung jawab secara langsung guna memberikan kajian, analisa, data, dan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya dalam pembangunan perikanan daratan. Visi BRPPUPP Berdasarkan Visi pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Selain itu juga mengacu visi Presiden 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dari visi Presiden kemudian ditetapkan visi KKP 2020-2024 untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden. Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Selanjutnya BPPSDM KP untuk mendukung visi KKP menetapkan visi BPPSDM KP 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi Pusat Penyuluhan KP adalah “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong melalui riset dan inovasi iptek perikanan”.

Visi Pusluh KP pada tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan SDM KP kompeten untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-

royong. Adapun keinginan tersebut dituangkan dalam visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan sebagai berikut: “Mewujudkan Sains Dan Teknologi Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan untuk Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kelestarian dan Pemanfaatan yang Berkesinambungan”

2. Misi

Dalam pencapaian Visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian potensi sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- b. Melakukan penelitian kegiatan perikanan tangkap di perairan umum daratan;
- c. Melakukan penelitian bio-ekologi ikan di perairan umum daratan;
- d. Meningkatkan pemanfaatan praktis hasil penelitian melalui diseminasi, simposium dan workshop kepada stakeholder;
- e. Menyebarkan informasi dan teknologi hasil penelitian dalam berbagai bentuk publikasi ilmiah dan semi ilmiah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694). BRPPUPP memiliki tugas Melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, dengan fungsi /uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset perikanan perairan umum dan penyuluh perikanan;
- b. Pelaksanaan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset Perikanan Perairan Umum Daratan;
- d. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

3. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi BRPPUPP yang telah dijelaskan tersebut diatas bertujuan untuk:

- a. Melestarikan Sumber plasma nuftah perikanan di perairan umum daratan
- b. Melestarikan dan memelihara kesehatan lingkungan ekosistem perairan umum daratan
- c. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan
- d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan di perairan umum daratan
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM untuk melakukan riset.
- f. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana riset
- f. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan

4. Sasaran Strategis

Renstra BRPPUPP Tahun 2020–2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BRPPUPP sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda *Logical Framework*.

Pada awal tahun 2025 sampai triwulan III tahun 2025 ini Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) dan di tanggal 11 Desember 2025 terjadi revisi PK terkait Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan yaitu menjadi 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Kegiatan pada Perjanjian Kinerja sebagai bentuk dukungan untuk mencapai Sasaran Strategis pada Level 0 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sasaran Program pada Level 1 BPPSDM, serta Sasaran Kegiatan pada Level 2 Pusat Penyuluhan KP. Dari 8 (delapan) Sasaran Strategis pada Level 0 KKP dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja, BRPPUPP mendukung 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja, sebagai berikut :

1. SS3. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat

IK7. Nilai PNBK Sektor KP

2. SS8. Reformasi birokrasi KKP yang berkualitas

IK17.Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP

IK18.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP

Sedangkan dari 7 (tujuh) Sasaran Program dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Program pada Level 1 BPPSDM, BRPPUPP mendukung 4 (empat) Sasaran Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program, yaitu :

1. IKP2. Nilai PNBK BPPSDM

2. SP3. Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk

IKP4. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Disuluh

IKP5. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya

IKP6. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk

3. SP7. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPSDM

IKP12. Batas Tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BPPSDM TA.2024

IKP13. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM

IKP14. Nilai PM SAKIP BPPSDM

IKP17. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPSDM

IK19. Nilai IKPA lingkup BPPSDM

IK20. Nilai NKPA lingkup BPPSDM

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mendukung Sasaran Kegiatan pada Level 2 Pusat Penyuluhan KP sebagai berikut :

1. Pusat Penyuluhan KP

Dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Kegiatan, BRPPUPP mendukung 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

SK5. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK9. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh

IKK10. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya

IKK11. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk

Selanjutnya, BRPPUPP mendukung Sasaran Strategis Level 0, Sasaran Program Level 1, dan Sasaran Kegiatan Level 2 pada tahun 2025, melalui Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut.

SK1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK1. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang disuluh di BRPPUPP dengan target pada tahun 2025 sejumlah 5.600 kelompok menjadi 3.430 kelompok pada tahun 2025

IKK2. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP pada tahun 2024 terdapat target sebanyak 223 menjadi 149 kelompok pada tahun 2025

IKK3. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang dibentuk di BRPPUPP pada tahun 2024 terdapat target 530 Kelompok dan menjadi 442 kelompok pada tahun 2025

IKK4. Nilai PNBP BRPPUPP ditahun 2024 dengan target sebesar Rp 40.000.000,- dan di Tahun 2025 dengan target sebesar 0,0399 Rupiah Miliar

SK3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK7. Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BRPPUPP pada tahun 2024 tidak terdapat target, pada tahun 2025 terdapat target sebanyak 1 Unit dan diakhir tahun 2025 untuk IKU ini dihilangkan karena terjadi pemblokiran anggaran sehingga kegiatannya tidak terlaksana.

IKK8. Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BRPPUPP pada tahun 2024 tidak terdapat target, namun pada tahun 2025 terdapat target 1 Unit dan diakhir tahun 2025 untuk IKU ini dihilangkan karena terjadi pemblokiran anggaran sehingga kegiatannya tidak terlaksana.

SK4. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

IKK9. Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP pada tahun 2024 memiliki target 81 dan pada tahun 2025 masih tetap 81

IKK10. Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2023 dengan target nilai 76 dan ditahun 2024 terdapat target sebesar 81 serta target ditahun 2025 yaitu 80.

IKK11. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2023 dengan target nilai 80 sehingga tidak terdapat target pada tahun 2020 dan ditahun 2025 terdapat target sebesar 85.

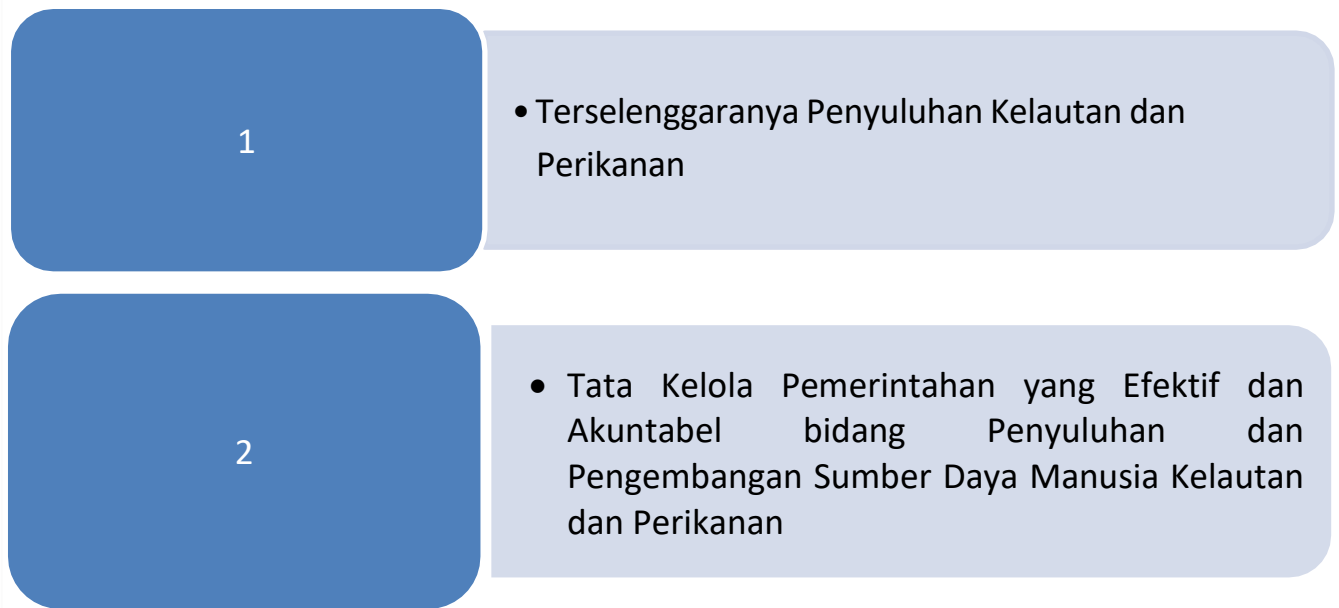
IKK12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP pada tahun 2020 memiliki target 88 dan menjadi 93,76 pada tahun 2024 dan target ditahun 2025 yaitu 92.

IKK13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP pada tahun 2020 memiliki target 85 dan menjadi 71 pada tahun 2024 dan ditahun 2025 menjadi 71,5

IKK14. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPUPP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2023 dengan target 3 kemitraan, sehingga tidak terdapat target pada tahun 2020 dan tahun 2025 terdapat target sebanyak 1 kemitraan BRPPUPP.

IKK15. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) merupakan IKU baru di Tahun 2025.

IKK16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%) merupakan IKU baru di Tahun 2025.



Gambar 3. Sasaran Kegiatan BRPPUPP tahun 2025

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRPPUPP Tahun 2025 menetapkan 2 program yaitu Pendidikan dan pelatihan vokasi, Riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran Rp. 79.348.679.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Output dan pagu anggaran 2025

KODE	OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN
7020	PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		2.912.400.000
7020.QDD.646	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan	4.048 Kelompok Masyarakat	2.912.400.000
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		76.436.279.000
2378.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	11.840.000
2378.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	76.412.480.000
2378.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	2.000.000
2378.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	4.700.000
2378.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	5.259.000
	TOTAL		79.348.679.000

Sumber: Program Anggaran BRPPUPP

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja BRPPUPP Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala BRPPUPP dengan Eselon II terkait, yaitu Kepala Pusat Penyuluhan KP yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja (IK) dan target.

A. Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusat Penyuluhan KP

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusat Penyuluhan KP memiliki 5 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusluh KP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	4.048
		2 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	149
		3 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	453
		4 Nilai PNBSP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	0,0412
		5 Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit)	28
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6 Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7 Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	14
		8 Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	10
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	9 Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)	1
		10 Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit)	1
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)	1
		12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	92
		14 Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	80
		15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	71,5
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16 Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	81
		17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80
		18 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	80

Pada Tahun 2025 tepatnya pada 11 Desember 2025 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja antara Pusluh KP dan BRPPUPP yaitu dibagian Anggaran, perubahan target Indikator kinerja dan menghapus 2 IKU yang tidak terlaksana karena terjadi pemblokiran anggaran, sehingga Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusat Penyuluhan KP menjadi memiliki 2 Sasaran Strategis dan 16 Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**

Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rezki Antoni S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok)	3.430
		2 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	149
		3 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	442
		4 Gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP di BRPPUPP (Unit)	28
		5 Nilai PNBSP Satker BRPPUPP (Rupiah Miliar)	0,0399
		6 Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	1
		7 Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	2
		8 Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	19
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPPUPP (Dokumen)	1
		10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85
		11 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	92
		12 Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	80
		13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	71,5
		14 Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	81
		15 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80
		16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.912.400.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM KP	76.436.279.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan		79.348.679.000

Jakarta, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rezki Antoni S

2.4 Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BRPUPP Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRPPUPP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BRPPUPP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Perintah Kepala BRPPUPP NOMOR : B.134/BRPPUPP/TU.110/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja Tahun 2025 dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala BRPPUPP. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, seksi Tata Operasional BRPPUPP merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

01

PRESTASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

02

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

03

AKUNTABILITAS KEUANGAN

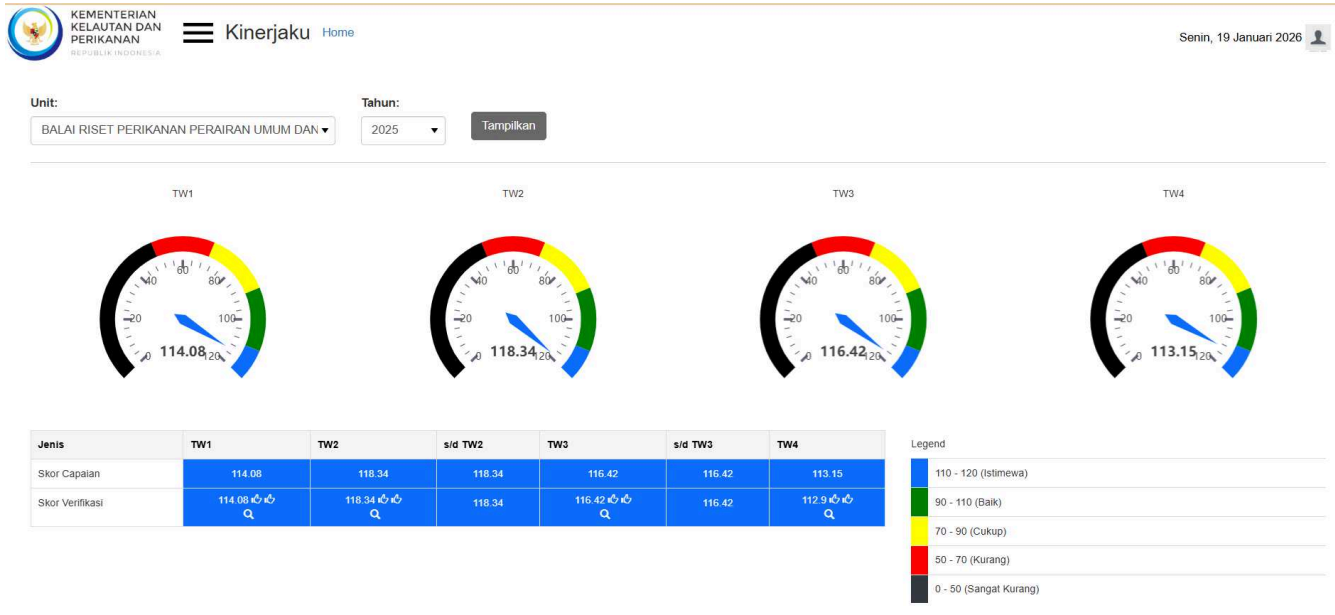
04

EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA
BRPPUPP TAHUN 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Indikator Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Tahun 2025 sebesar 113,15% per 19 Januari 2026, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerja Tahun 2025 BRPPUPP.

Selama Tahun 2025, dari target 16 IKU BRPPUPP terdapat 16 IKU yang telah mencapai target di Tahun 2025, sehingga memperoleh warna biru dengan 9 IKU dan 7 IKU berwarna hijau.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPPUPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BRPPUPP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TA. 2025		%
				TARGET	CAPAIAN	
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok)	3.430	3.711	108,19
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	149	160	107,38
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	442	465	105,20
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP BRPPUPP (Unit)	28	36	120
		5	Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	0,0399 (0,04 di aplikasi kinerjaku)	0,0413 (0,04 di aplikasi kinerjaku)	103,54
		6	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	1	2	120
		7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	2	3	120
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	19	23	120
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPPUPP (Dokumen)	1	2	120
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85	100	117,65
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	92	99,72	108,39
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	80	84,40	105,50
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	71,5	100	120
		14	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	81	83,35	102,90
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80	100	120
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	80	100	120

Sumber: Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN 1 :**Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan****Indikator Kinerja 1**

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok).
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung

sektor kelautan dan perikanan yang disuluh dan dibentuk pada tahun 2024 oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pendampingan akses modal, pendampingan akses perizinan berusaha dan pendampingan manajemen usaha kelompok. Pelaksanaan pendampingan sesuai penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPPSDMKP/ Surat Kepala Pusat Penyuluhan KP tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Adapun cara pengukuran untuk IKU ini yaitu Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang disuluh disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil.

Tabel 4. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TA 2025	Realisasi TA. 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
6.384	5.178	5.633	5.616	3.430	3.711	108,19	- 33,92	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Pada Tahun 2025 capaian indikator kinerja ini telah mencapai persentase sebesar 108,19% dari target yang ditetapkan. Realisasi yang didapat adalah sebesar 3.711 kelompok dengan target di Tahun 2025 sebanyak 3.430 kelompok. Pada tahun 2024 indikator ini telah tercapai sebesar 5.616 kelompok. Dilihat dari jumlah realisasi dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan capaian di tahun 2025 sebesar -33,92% namun realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang ditetapkan di TA 2025. Apabila dilihat dari Tahun 2021 sampai 2025 untuk Target dan Realisasi IKU ini selalu berubah-ubah.

Perolehan capaian indikator kinerja yang melebihi target ini dapat dikarenakan kinerja penyuluh perikanan SATMINKAL BRPPUPP sangat baik dan mengalami peningkatan kinerja di Tahun 2025.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang disuluh di BRPPUPP dapat melampaui target antara lain adalah :

1. Penyuluh perikanan memiliki tugas pokok yaitu melakukan penyuluhan kelompok dan harus dituangkan di SKP, sehingga seluruh Penyuluh harus mencapai targetnya;
2. Terbitnya Peraturan Kepala BPPSDM KP No. 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan P3K, dan Penyuluh Perikanan Bantu
3. yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas serta target yang harus dicapai oleh penyuluh;
4. Profil Kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang disuluh disusun dan diperbarui sebagai data dukung indikator kinerja Kelompok Pelaku usaha/Pelaku pendukung yang Disuluh.

Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok) ini jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Satminkal lain lingkup Pusluh KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok) Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	3.430	3.711	108,19
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	4.580	5.500	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	4.800	5.665	118,02
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	3.140	3.768	120

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP Satminkal yang capaiannya 108,19% dan untuk UPT lain capaiannya telah melebihi 110%. Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penyuluhan bukan saja berperan dalam kegiatan prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan, akan tetapi juga berintegrasi dengan fungsi pendampingan yang secara terus menerus sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha kelautan dan perikanan yang akhirnya meningkatkan produktivitas usahanya.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 728.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 728.029.700,- (99,99%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,2%.

Indikator Kinerja 2

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok). Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluh Kelautan dan Perikanan, dengan kriteria sesuai Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.

Adapun pengukuran untuk IKU ini yaitu menghitung Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan kelasnya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke kelas Utama) dari Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan

kelasnya yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 6. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
295	276	271	226	149	160	107,38	- 29,20	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator ini pada Tahun 2025 telah mendapat realisasi sebanyak 160 kelompok dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 149 kelompok, sehingga persentase capaian untuk indikator ini sebesar 107,38%. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi pada periode yang sama di tahun 2024 terdapat penurunan sebesar -29,20% di 2025, dimana tahun 2024 indikator ini mencapai realisasi 226 kelompok. Penurunan ini dapat diakibatkan karena belum semua kelompok bisa menumbuhkan kelompok di daerah binaannya, atau masih dalam proses kelengkapan administrasi sehingga belum dapat dijadikan capaian IKU.

Perolehan nilai capaian indikator berikut dapat dikarenakan penyuluh SATMINKAL BRPPUPP telah menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kelas kelompok kelautan dan perikanan yang mereka bina, sehingga capaian pada indikator berikut dapat mencapai target.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) pada Tahun 2025 dapat mencapai target antara lain adalah telah dilakukannya pendampingan kelompok oleh Penyuluh perikanan serta melakukan penilaian kelas terhadap kelompok binaannya untuk mencapai target kinerja sesuai jabatan dan merupakan IKU utama penyuluh yang nantinya dituangkan di SKP.

Kelompok yang telah dilakukan penilaian telah memenuhi kriteria untuk dapat dinaikkan kelasnya sesuai dengan Kepmen KP No.14 Tahun 2012 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan
- Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusluh KP,
- Pelaporan online dokumen capaian kinerja Penyuluh Perikanan, dan SKP Penyuluh Perikanan beserta data dukungnya,
- Evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	149	160	107,38
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	168	175	104,17
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	248	250	100,81
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	98	118	120

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya diatas 100%.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang ditingkatkan oleh Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 728.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 728.029.700,- (99,99%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 107,38% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,39%.

Indikator Kinerja 3

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan dibentuk pada tahun berjalan, dengan kriteria pembentukan kelompok berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Adapun cara pengukuran IKU ini yaitu Hitung Jumlah kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang dibentuk dan memenuhi kriteria pembentukkan kelompok dan Jumlah kelompok Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan di periode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 8. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
906	716	554	585	442	465	105,20	- 20,51	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2025 capaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 465 kelompok dari target sebanyak 442 kelompok. Jika dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2025 tahun 2024, indikator ini memiliki penurunan sebesar 20,51% dengan jumlah realisasi di tahun tersebut sebanyak 585 kelompok. Artinya pada tahun ini, terdapat

peningkatan kinerja penyuluh dalam memenuhi pencapaian target indikator pembentukan kelompok.

Terlampauinya capaian dari target yang telah ditetapkan serta terjadi nya kenaikan persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga dapat dikarenakan banyak potensi di wilayah binaan yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru serta kinerja penyuluh SATMINKAL BRPPUPP sangat baik sehingga dapat membentuk banyak kelompok baru di wilayah binaan penyuluh masing-masing.

Capaian Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	442	465	105,20
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	497	535	107,65
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	889	911	102,47
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	359	432	120

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian BRPPUPP telah melebihi target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu mencapai persentase 105,20%, begitu pula dengan satminkal lainnya capaian IKU ini sdh di atas 100%

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan
- Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Puslatluh KP,
- Pelaporan online dokumen capaian kinerja Penyuluh Perikanan, dan SKP Penyuluh Perikanan beserta data dukungnya
- Evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang dibentuk oleh Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 728.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 728.029.700,- (99,99%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 105,20% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,21%.

Indikator Kinerja 4

Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP BRPPUPP (Unit). Definisi dari IKU ini yaitu Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan

kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Tabel 10. Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP BRPPUPP (Unit)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	28	36	120	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan oleh penyuluh kelautan dan perikanan. Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2025 capaian indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu tercapai 36 unit dari target sebanyak 28 unit. IKU ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena baru terdapat di tahun 2025.

Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP BRPPUPP (Unit)

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	28	36	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	25	30	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	43	52	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	35	42	120

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP dan 3 Satker lainnya memperoleh 120% yang artinya capaian untuk IKU ini seluruh telah mencapai target yang ditentukan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi oleh Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 728.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 728.029.700,- (99,99%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,01%.

Indikator Kinerja 5

Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)

Definisi dari IKU ini yaitu Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak

yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNB : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum :

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNB

b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNB

c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN

PMK 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNB

Formula Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya dan/atau surat penyampaian realisasi PNB dari Sekretariat BPPSDM KP

Tabel 12. Capaian IKU Nilai PNB Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	0,20	424,89	0,0399 (0,04)	0,0413 (0,04)	103,54	-97	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Untuk realisasi indikator kinerja PNB capaian di Tahun 2025 sebesar 0,0413 dengan target 0,0399 dan persentase sebesar 103,54%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023-2024, terjadi penurunan sebesar 97% dimana capaian untuk IKU Nilai PNB pada tahun 2023-2024 adalah sebesar 290 Juta dan untuk Tahun 2021-2022 belum terdapat Target IKU Nilai PNB di Satker di BRPPUPP.

Nilai PNB BRPPUPP yang didapat di Tahun 2025 berasal dari Surat Dinas penyampaian Capaian PNB dari BPPSDM NOMOR 178/BPPSDM.1/KU.340/I/2026 per tanggal 12 Januari 2026 dengan rincian terlampir pada tabel berikut:

Tabel 13. Rincian PNPB dari Surat Dinas Penyampaian PNPB BPPSDM KP

**CAPAIAN KINERJA PNPB SATKER BPPSDM
TAHUN ANGGARAN 2025**

REALISASI PENDAPATAN PER SATKER LINGKUP BPPSDMKP TAHUN 2025				
NO	Kode Nama Satker	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
	03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	38.853.240.000	50.136.939.163	129,04%
	SATKER PNPB	14.250.179.000	11.126.256.821	78,08%
1	03212-237373 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	284.242.000	780.431.842	274,6%
2	03212-238010 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	411.665.000	472.324.776	114,7%
3	03212-238741 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	55.052.000	57.172.492	103,9%
4	03212-238755 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	735.185.000	778.364.570	105,9%
5	03212-238762 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	319.141.000	402.849.385	126,2%
6	03212-239260 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	188.600.000	233.678.011	123,9%
7	03212-352595 AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)	17.177.000	23.161.771	134,8%
8	03212-403817 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	28.393.000	28.393.736	100,0%
9	03212-403820 LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	-	13.459.398	-
10	03212-403821 PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.025.000	159.143.859	289,2%
11	03212-403822 BALAI RISET PERIKANAN LAUT	-	58.519.975	-
12	03212-403823 BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	39.982.000	41.312.999	103,3%
13	03212-403824 BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2.200.000	33.815.448	1537,1%
14	03212-403826 LOKA RISET PERIKANAN TUNA	-	7.160.000	-
15	03212-403827 BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	241.328.000	251.780.664	104,3%
16	03212-403828 BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	941.493.000	1.028.132.377	109,2%
17	03212-403829 BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	92.800.000	176.484.476	190,2%
18	03212-403830 BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	181.774.000	195.154.380	107,4%
19	03212-403832 BALAI RISET PEMULIHAN IKAN	408.640.000	460.318.570	112,6%
20	03212-403833 LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	26.500.000	119.795.732	452,1%
21	03212-403834 LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	-	3.416.975	-
22	03212-403835 BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	13.559.200	-
23	03212-403836 BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	54.985.506	-
24	03212-403837 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	111.885.000	595.849.370	532,6%
25	03212-403838 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	160.329.000	165.460.205	103,2%
26	03212-403839 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	385.000.000	554.815.173	144,1%
27	03212-403875 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	95.797.000	99.591.100	104,0%
28	03212-403879 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	20.915.000	85.049.871	406,6%
29	03212-427511 POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	1.914.969.000	2.016.706.137	105,3%
30	03212-427551 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	36.805.000	43.036.914	116,9%
31	03212-427573 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	504.543.000	523.839.215	103,8%
32	03212-427582 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	-	120.305.178	-
33	03212-427618 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	344.304.000	365.863.510	106,3%
34	03212-427630 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	-	277.368.537	-
35	03212-440013 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	454.385.000	498.295.335	109,7%
36	03212-626402 SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	176.748.750	-
37	03212-634146 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	140.035.000	148.091.532	105,8%
38	03212-652009 SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	15.610.000	20.708.072	132,7%
39	03212-653526 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	32.775.000	41.111.780	125,4%
	SATKER BLU	24.603.061.000	39.010.682.342	158,6%
40	03212-239188 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	14.262.371.000	25.847.561.796	181,2%
41	03212-622035 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	10.340.690.000	13.163.120.546	127,3%

Sumber: Surat BPPSDM NOMOR 178/BPPSDM.1/KU.340/I/2026 per tanggal 12 Januari 2026

Salah satu faktor yang mendukung dan kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU PNPB sehingga dapat melebihi target yaitu :

- Kontribusi dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.
- Kontribusi dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya dari kegiatan SFV UPT Mariana dan Kegiatan di Instalasi Patra Tani.
- Kontribusi dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian Indikator kinerja ini antara lain adalah:

1. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPPUPP melalui: (a) monitoring pada aplikasi OMSPAN maupun SIMPONI, (b) laporan mingguan dan bulanan internal BRPPUPP, serta (c) Kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per Triwulan di internal BRPPUPP.
2. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP melalui kegiatan pengukuran capaian kinerja per triwulan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusluh KP.
3. Memasukkan ke dalam SKP pegawai terkait pelaporan nilai PNBPN sebagai upaya monitoring capaian PNBPN perbulan.

Capaian IKU Nilai PNBPN BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU Nilai PNBPN Satker BRPPUPP dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	0,0399 (diaplikasi kinerjaku)	0,0413 (0,04 diaplikasi Kinerjaku)	103,54
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0,94	1,03	109,57
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	0,09	0,18	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	0,24	0,25	104,17

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP dan satker lainnya memperoleh capaian di atas 100% yang artinya capaian untuk IKU ini seluruh telah melampaui target yang ditentukan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah sebesar Rp. 0 dan telah terealisasi sebesar Rp. 0 (0%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Indikator Kinerja 6

Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket). Definisi dari IKU ini yaitu Media penyuluhan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha. Media penyuluhan terdiri atas media tercetak, media terdengar dan media tertayang. Media tercetak misalnya folder, leaflet, poster dan lainnya. Media terdengar antara lain naskah siaran radio. Media tertayang antara lain video, podcast dan lainnya. Formula perhitungan untuk iku ini sebagai berikut: Jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP sesuai binaannya

Tabel 15. Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	1	2	120	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Media penyuluhan dalam bentuk softcopy/file yang telah disusun oleh Satminkal sesuai kebutuhan pelaku usaha untuk digunakan Penyuluh Perikanan melakukan penyuluhan. Untuk Tahun 2025 dari target sebanyak 1 paket telah terealisasi sebanyak 2 paket yang terdiri dari paket leaflet dan brosur serta paket berupa video penyuluhan dan IKU ini merupakan IKU baru di BRPPUPP tahun 2025.

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120

Sumber: LKj UPT

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah sebesar Rp. 0 dan telah terealisasi sebesar Rp. 0 (0%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Indikator Kinerja 7

Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang). Definisi dari IKU ini yaitu Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP. Formula perhitungan IKU ini yaitu Hitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh Assesment Center KKP.

Tabel 17. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	2	3	120	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Data Penyuluh Perikanan PNS yang lulus penilaian Kompetensi by name by address beserta link Sertifikat/Surat Keterangan dari Biro SDMAO KKP. Di Tahun 2025 ini BRPPUPP mempunyai target sebanyak 2 orang dengan realisasi sebanyak 3 orang yang lulus Penilaian Kompetensi dengan persentase sebesar 120%, IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025.

Tabel 18. Perbandingan Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	2	3	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	5	11	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	3	5	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100

Sumber: LKj UPT

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah sebesar Rp. 0 dan telah terealisasi sebesar Rp. 0 (0%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Indikator Kinerja 8

Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang). Definisi dari IKU ini yaitu Merupakan indikator yang menunjukkan presentase jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku.

Tabel 19. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	19	23	120	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Data Penyuluh kelautan dan Perikanan yang lulus Sertifikasi Pelatihan Teknis by name by address beserta link Sertifikat/Surat Keterangan dari Penyelenggaran. Di Tahun 2025 ini BRPPUPP mempunyai target sebanyak 19 orang dengan realisasi sebanyak 23 orang yang lulus Pelatihan Teknis dengan persentase sebesar 120%, IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025.

Tabel 20. Perbandingan Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	19	23	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	14	17	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	14	18	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120

Sumber: LKj UPT

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah sebesar Rp. 0 dan telah terealisasi sebesar Rp. 0 (0%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

SASARAN KEGIATAN 2 :

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 9

Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPPUPP (Dokumen). Definisi IKU ini yaitu Jumlah dokumen kerja sama Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan antar lembaga dan internasional yang ditandatangani/ disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dasar Hukum:

- Dasar Hukum PerMenKP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian di lingkungan KKP
- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama Penyuluhan kelautan dan perikanan
- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT
- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama
- Ruang lingkup meliputi:
 - Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
 - Diseminasi dan publikasi
 - Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama
 - Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM

Tabel 21. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPPUPP (Dokumen)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
2	1	4	2	1	2	120	100	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Berdasarkan tabel diatas, Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPUPP (dokumen) memiliki target sebanyak 1 dokumen dan capaian di Tahun 2025 terdapat sebanyak 2 dokumen sehingga persentase capaian sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024, terdapat persamaan realisasi dari jumlah kemitraan di tahun tersebut yaitu 2 kemitraan.

Kemitraan yang terbangun dilakukan melalui beberapa mekanisme yakni:

- 1) Universitas : Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan. Peran perguruan tinggi selalu terkoneksi dengan triangle academic yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

a. Universitas Terbuka

Partisipasi UT dalam kerja sama ini menyoroti komitmen bersama dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkesinambungan. Melalui metode pembelajaran jarak jauh, BRPPUPP dan UT merancang inisiatif untuk mempermudah akses pendidikan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yaitu Penyuluh Perikanan Satminkal BRPPUPP yang meliputi 5 provinsi (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung). Selama 3 (tiga) tahun ke depan, BRPPUPP menjalin kerja sama dengan Universitas Terbuka melalui kekhususan Program Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan dan Jenjang Pascasarjana (S2) melalui kekhususan Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan (MMP), serta berkolaborasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- 2) Sewa Menyewa Tanah oleh PT Dizamatra Powerindo

Landasan pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dengan PT Dizamatra Powerindo yakni Surat Keputusan MENKP RI Nomor 778/KEPMEN KP/SJ/PL.720/2023. Berdasarkan Surat Persetujuan Sewa BMN dari Menteri Keuangan RI Nomor S- 172/MK.6/KNL.0402/2023 ditetapkan bahwa sebagian tanah dengan total luas 7.500 m2, terletak di Kelurahan Patratani, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang akan dimanfaatkan sebagai jalan hauling batubara untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Capaian IKU Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP

(Dokumen) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Perbandingan Capaian IKU Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPPUPP (Dokumen) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 120%. Anggaran yang mendukung IKK ini sebesar Rp. 0 dan telah terealisasi sebesar Rp. 0 (0%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Indikator Kinerja 10

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%). Definisi IKU ini yaitu Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sampai dengan waktu pengukuran. Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Surat penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP Nomor: B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026 tanggal 09 Januari 2026.

Tabel 23. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	80	100	85	100	117,65	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 ini capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPUPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) memiliki presentase capaian sebesar 100% yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan target 85.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP mencapai target pada Tahun 2025 ini antara lain disebabkan oleh telah ditindaklanjutinya rekomendasi Itjen KKP oleh BRPPUPP

yang termuat pada aplikasi SIDAK.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain :

- a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan
- b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusluh KP.

Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%) satker lingkup Pusluh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	85	100	117,65
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	85	100	117,65
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	85	100	117,65
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	85	85	100

Sumber: LKj UPT

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa persentase capaian terhadap target indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP memiliki persentase capaian yang sama dengan Satker BRPBATPP Bogor dan BRPBAPPP Maros karena dilakukan sampling oleh Itjen KKP dan telah melakukan tindak lanjut secara keseluruhan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Anggaran yang mendukung IKK ini sebesar Rp. 0,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0 (0%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 117,65% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Indikator Kinerja 11

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai), Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan:

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

• Nilai IKPA =
$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 25. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
96,41	95,76	95,60	97,42	92	99,72	108,39	97,69	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRPPUPP sebesar 99,72 yang mana angka tersebut telah melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2025 yaitu sebesar 92. Maka persentase capaian yang didapat yaitu 108,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian di periode yang sama di Tahun 2024, telah terjadi peningkatan sebesar 2,3%. Capaian IKPA ini berdasarkan Nota Dinas NOMOR 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026.

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26. Perbandingan Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (nilai) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	92	99,72	108,39
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	92	98,09	106,62
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	92	98,46	107,02
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	92	99,96	108,65

Sumber: LKj UPT

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa persentase capaian terhadap target indikator kinerja IKPA memiliki persentase capaian yang berbeda dengan BRPBATPP Bogor, BBRBLPP Gondol dan BRPBAPPP Maros. Anggaran yang mendukung IKK ini sebesar Rp. 70.082.603.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 69.972.482.974 (99,84%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,55%.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Nilai IKPA BRPPUPP dapat mencapai target antara lain adalah : 1. Pelaksanaan anggaran yang dinilai melalui aplikasi OMSPAN sudah bernilai baik dari segi implementasi pelaksanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan

kualitas hasil pelaksanaan anggarannya. 2. Pengelola Anggaran BRPPUPP telah dapat melaksanakan tugasnya dalam meminimalisir revisi DIPA, pengelolaan UP yang konsisten, serta penyelesaian tagihan SPM yang dilakukan tepat waktu. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain: a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusluh KP. c) Monitoring realisasi anggaran di aplikasi OMSPAN dan realisasi anggaran akrual dan SP2D oleh Sekretariat BPPSDM KP

Indikator Kinerja 12

Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)

Definisi IKU ini yaitu Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Bukti data dukungnya berupa: (1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen. (2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BPPSDM

Tabel 27. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	81,15	81,75	80	84,40	105,50	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP memiliki realisasi sebesar 84,40 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80. Persentase dari capaian IKU ini yaitu sebesar 105,50 hal ini menunjukkan

bahwa nilai Penilaian Mandiri sakip telah melampaui target yang ditetapkan di Tahun 2025. Penilaian Mandiri SAKIP dilakukan dengan berpedoman pada Permen KP Nomor 68 Tahun 2017 dan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 dengan melakukan verifikasi bukti dukung yaitu Pemenuhan dokumen SAKIP meliputi dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal kemudian dilakukan pengisian hasil penilaian mandiri SAKIP pada aplikasi DSMS BPPSDM. Nilai SAKIP BRPPUPP Tahun 2025 berdasarkan penilaian mandiri yaitu sebesar 84,40. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari nilai SAKIP secara mandiri tersebut termasuk ke dalam kategori A (Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator). Hasil penilaian SAKIP dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 28. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP 2025

Catatan Atas Verifikasi Penilaian Mandiri SAKIP

Satker Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang Tahun 2025

No	Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	25,20	1. Apresiasi atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja setidaknya 5 tahun terakhir.	1. Menjadikan budaya kinerja yang baik dalam penyediaan dokumen dan pelaksanaan perencanaan kinerja
2	Pengukuran Kinerja	26,10	1. Apresiasi atas ketersediaan dokumen pengukuran kinerja setidaknya 5 tahun terakhir. 2. Apresiasi atas adanya upaya dalam pemenuhan kriteria berupa Aplikasi Kinerja Simkaluh	1. Menjadikan budaya kinerja yang baik dalam penyediaan dokumen dan pelaksanaan pengukuran kinerja
3	Pelaporan Kinerja	12,60	1. Apresiasi atas ketersediaan dokumen pengukuran kinerja setidaknya 5 tahun terakhir.	1. Menjadikan budaya kinerja yang baik dalam penyediaan dokumen dan pelaksanaan pelaporan kinerja
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,50	1. Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan dan tersedia setidaknya 4 tahun terakhir.	1. Menjadikan budaya kinerja yang baik dalam penyediaan dokumen dan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Total Nilai		84,40		
Predikat		A (Memuaskan)		

Capaian Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (nilai) di satker lingkup Pusluh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Perbandingan Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	80	84,40	108,39
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	81	83,5	103,09
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	81	82,9	102,35
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	81	83,05	102,53

Sumber: LKj UPT

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa persentase capaian terhadap target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP memiliki persentase capaian yang berbeda dengan BRPBATPP Bogor, BBRBLPP Gondol dan BRPBAPPP Maros sehingga capaiannya adalah di atas 100%. Anggaran yang

mendukung IKK ini adalah Penyusunan Program dan anggaran sebesar Rp. 4.700.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.700.000. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 108,39% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,39%.

Indikator Kinerja 13

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)

Definisi IKU ini adalah Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Tabel 30. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
85,22	87,1	86,46	100	71,5	100	120	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (nilai) Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (nilai) memiliki nilai capaian di Tahun 2025 sebesar 100, dimana angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dengan presentase capaian sebesar 120%. data diperoleh melalui aplikasi smart DJA capaian pada akhir Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi yang diperoleh adalah 100. Keberhasilan pencapaian target untuk indikator

Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP antara lain kegiatan yang terlaksana dengan baik dan penyerapan anggaran serta realisasi output yang sesuai target dan juga pengukuran dan evaluasi anggaran BRPPUPP terlaksana tepat waktu dan akuntabel melalui updating data di aplikasi SmartDJA. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain: a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusrisikan dengan instrument monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusluh KP. c) Monitoring penyerapan anggaran dan capaian output pada aplikasi SMART DJA oleh Sekretariat BRSDM KP. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31. Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	71,5	100	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	71,5	100	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	71,5	100	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	71,5	100	120

Sumber: LKj UPT

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa persentase capaian terhadap target indikator kinerja NKPA memiliki persentase capaian yang sama dengan BRPBATPP Bogor, BRPBAPPP Maros dan BBRBLPP Gondol sehingga capaiannya adalah sebesar 120%. Anggaran yang mendukung IKK ini sebesar Rp. 0.dan telah terealisasi sebesar Rp 0 (0%) Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Indikator Kinerja 14

Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)

Definisi IKU ini antara lain: Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a)Kualifikasi, (b)

Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.

- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Tabel 32. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
75,46	79,46	87,65	85,08	81	83,35	102,90	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRPPUPP telah tercapai dengan realisasi 83,35 dari target yang ditetapkan sebesar 81. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2024 capaian indikator ini mengalami penurunan dimana realisasinya sebesar 85,08. Walaupun demikian, hal tersebut menunjukkan kinerja pegawai BRPPUPP selama Tahun 2024 sudah baik serta terjadi peningkatan kompetensi yang didapatkan melalui diklat dan seminar, sehingga jika disimpulkan bahwa Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRPPUPP di Tahun 2025 mengalami peningkatan dan diharapkan dapat terus meningkat di tahun yang akan datang.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks) satker lingkup Pusluh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33. Perbandingan Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	81	83,35	102,90
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	81	84,29	104,06
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	81	84,99	104,93
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	81	83,39	102,95

Sumber: KLj UPT

IKU ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BPPSDMKP, dimana capaian kinerja BRPPUPP dalam penilaian indeks profesionalitas Tahun 2025 dapat dibandingkan dengan satker lainnya lingkup Pusat Penyuluhan KP. Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 1.896.000 (94,8%) dengan pagu Rp. 2.000.000. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 102,90% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,1%.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP dapat mencapai target antara lain adalah data kompetensi pegawai pada aplikasi e-pegawai KKP telah rutin terupdate, melakukan monitoring capaian IP ASN lingkup BRPPUPP dilakukan secara berkala dan disampaikan melalui memo Kepala BRPPUPP, serta memberikan himbauan kepada pegawai untuk selalu rutin mengupdate data kepegawaian di aplikasi e-pegawai KKP. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain : a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP dengan instrument monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusluh KP, c) Monitoring nilai IP ASN lingkup BRPPUPP secara berkala melalui aplikasi ropeg.kkp.go.id dan melakukan pemantauan untuk bukti data dukung yang diunggah pegawai pada aplikasi epegawai KKP

Indikator Kinerja 15

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)

Definisi IKU ini adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungannya yaitu:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurangan terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 34. Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80	100	120	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 ini capaian indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) memiliki presentase capaian sebesar 100 yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan target 80. Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 6.338.673.761 (99,86%) dengan pagu Rp 6.346.976.000,-. Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) mencapai target pada Tahun 2025 ini antara lain disebabkan oleh Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain :

- Pemantauan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja).
- Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusluh KP.

Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) satker lingkup Pusluh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Perbandingan Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120

Sumber: LKj UPT

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa persentase capaian terhadap target indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) memiliki

persentase capaian yang sama dengan BRPBATPP Bogor, Maros dan Gondol sehingga capaiannya adalah sebesar 120%. Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 6.346.976.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 6.338.673.761 (99,86%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,14%

Indikator Kinerja 16

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)

Definisi dari IKU ini yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Formula Perhitungan untuk IKU ini Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

Formula

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:

- a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
- b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan Tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Tahun 2025 (bobot 25%);

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);

5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

Tabel 36. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)

Realisasi Tahun				Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80	100	120	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 ini capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%) memiliki presentase capaian sebesar 100 yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan

yaitu dengan target 80.

Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%) satker lingkup Pusluh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%) dengan satminkal lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	80	90	112,5
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	80	97,5	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	80	97,5	120

Sumber: LKj UPT

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa persentase capaian terhadap target indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) memiliki persentase capaian yang sama dengan BRPBATPP Bogor, Maros dan Gondol. Anggaran yang mendukung IKK ini sebesar Rp. 0.dan telah terealisasi sebesar Rp 0 (0%) Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2025, DIPA BRPPUPP memiliki 2 (dua) program dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 75.788.129.000, yang terdiri dari Program Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan pagu awal Rp. 3.546.805.000 dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 72.241.324.000. Pada April 2025 terdapat revisi anggaran yang akhirnya untuk Program Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan mengalami penurunan menjadi Rp. 3.016.052.000 sehingga pagu revisi BRPPUPP sebesar Rp 75.257.376.000. Pada Agustus 2025 dilakukan revisi anggaran kembali yaitu penghapusan pagu blokir yang terdapat di BRPPUPP sehingga pagu BRPPUPP sampai dengan TW IV 2025 sebesar Rp 73.228.299.000. Pada Desember 2025 terdapat penambahan pagu untuk Belanja Pegawai dikarenakan adanya penambahan pegawai PPPK yang baru dilantik pada Oktober 2025 sehingga Pagu revisi BRPPUPP sebesar Rp 79.348.679.000,-.

Sampai dengan Tahun 2025 TA 2025, telah dilakukan revisi terhadap DIPA BRPPUPP sebanyak 10 kali, yaitu :

1. Revisi 1 : Revisi pemutakhiran KPA (penyesuaian anggaran outsourcing)
2. Revisi 2 : Revisi blokir anggaran (efisiensi) revisi DJA
3. Revisi 3 – 4 : Revisi DJA (pergeseran blokir)

4. Revisi 5 : Revisi DJA (Relaksasi Blokir)
5. Revisi 6 : Revisi Halaman 3 DIPA
6. Revisi 7: Revisi Pergeseran anggaran dalam satu RO kewenangan Kanwil
7. Revisi 8: Revisi Pergeseran anggaran dalam satu RO kewenangan Kanwil
8. Revisi 9: Revisi Penghapusan Blokir (anggaran terblokir) kewenangan DJA
9. Revisi 10: Revisi Pergeseran anggaran dalam satu RO kewenangan Kanwil
10. Revisi 11: Revisi Halaman 3 DIPA
11. Revisi 12: Revisi Pergeseran anggaran dalam satu RO kewenangan Kanwil
12. Revisi 13: Revisi DJA tambahan pagu untuk gaji minus
13. Revisi 14: Revisi Pergeseran anggaran dalam satu RO kewenangan Kanwil,
revisi Halaman 3 DIPA
14. Revisi 15: Revisi Pergeseran anggaran dalam satu RO kewenangan Kanwil

Penyerapan anggaran BRPPUPP sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 38. Realisasi Anggaran BRPPUPP Tahun 2025

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL		
					PEGAWAI		BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA		SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN		TRANSFER	
^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v
1	032-403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	014	PAGU		70,065,504,000	9,283,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,348,679,000	
				REALISASI		69,948,922,849	9,274,304,333	0	0	0	0	0	0	0	0	79,223,227,182	
				PERSENTASE		(99.83%)	(99.90%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.84%)	
				SISA		116,581,151	8,870,667	0	0	0	0	0	0	0	0	125,451,818	
				TOTAL	PAGU	70,065,504,000	9,283,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,348,679,000	
				REALISASI		69,948,922,849	9,274,304,333	0	0	0	0	0	0	0	0	79,223,227,182	
				PERSENTASE		(99.83%)	(99.90%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(99.84%)	
				SISA		116,581,151	8,870,667	0	0	0	0	0	0	0	0	125,451,818	

Sumber : data realisasi, aplikasi OMSPAN per tgl 31 Desember 2025

Tabel diatas merupakan data penyerapan anggaran BRPPUPP berdasarkan data pagu dan realisasi aplikasi OMSPAN sebesar Rp 79.348.679.000,-. Sehingga realisasi sebesar Rp. 79.229.871.535 (99,85%).

Dalam mencapai target Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan di Tahun 2025, maka diperlukan alokasi anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan. Berikut adalah tabel realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan BRPPUPP di Tahun 2025.

Tabel 39. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Per IKU

Indikator Kinerja Kegiatan		Kegiatan Pendukung (Renja/Rkaki 2025)	Kode	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi TAHUN 2025	%	Satuan Output	Target Output	Realisasi IKU TAHUN 2025	% Capaian NPSS	Efisiensi
S.1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				Rp. 2.912.400.000	Rp 2.912.118.800	99,99				112,24	12,25
1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 728.100.000	Rp. 728.029.700	99,99	Kelompok	3.430	3.711	108,19	8,2
2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 728.100.000	Rp. 728.029.700	99,99	Kelompok	149	160	107,38	7,39
3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 728.100.000	Rp. 728.029.700	99,99	Kelompok	442	465	105,20	5,21
4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP BRPPUPP (Unit)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 728.100.000	Rp. 728.029.700	99,99	Unit	28	36	120	20,01
5	Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	-		Rp -	Rp -	-	Rupiah Milyar	0,0399 (0,04 diaplikasi kinerjaku)	0,0413 (0,04 diaplikasi kinerjaku)	103,54	100

6	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	-	-	Rp -	Rp -	-	Paket	1	2	120	100
7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	-	-	Rp -	Rp -	-	Orang	2	3	120	100
8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	-	-	Rp -	Rp -	-	Orang	19	23	120	100

S. 5 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				Rp 76.436.279.000	Rp 76.317.752.735	89,84				114,05	14,21
Indikator Kinerja Kegiatan		Kegiatan Pendukung (Renja/Rkaki 2025)	Kode	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi TAHUN 2025	%	Satuan Output	Target Output	Realisasi IKU TAHUN 2025	% Capaian NPSS	Efisiensi
11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)	-	-	Rp -	Rp -	-	Dokumen	1	2	120	100
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	-	-	Rp -	Rp -	-	%	85	100	117,65	100
13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyuluhan KP Layanan Tata Usaha dan Kerumahaan Penyuluhan KP Layanan Perkantoran	'2378.EBD.955.201. DA 2378.EBA.962.201. DA 2378.EBA.994.	Rp 70.082.603.000	Rp 69.972.482.974	99,84	Nilai	92	99,72	108,39	8,55
14	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	.Penyusunan Program dan Anggaran Penyuluhan KP	'2378.EBD.952.201. DA	Rp 4.700.000	Rp 4.700.000	100	Nilai	80	84,4	105,50	5,5
15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)		-	Rp -	Rp -	-	Nilai	71,50	100	120	100
16	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	Layanan Manajemen SDM. Pelayanan Kearsipan	'2378.EBC.954 2378.EBD.974	Rp 2.000.000	Rp 1.896.000	94,8	Indeks	81	83,35	102,90	8,1
17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	'2378.EBA.994.00 2.	Rp 6.346.976.000	Rp 6.338.673.761	99,86	%	80	100	120	20,14
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	.Layanan BMN	'2378.EBA.956	Rp 5.000.000	Rp -		%	80	100	120	100
				Rp 79.348.679.000	Rp 79.229.871.535	99,85				113,15	13,3

Sumber : aplikasi kinerjajaku dan OMSPAN Kementerian Keuangan

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP Tahun 2025

Efisiensi adalah cara untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud adalah waktu, tenaga (sumberdaya manusia) dan biaya (anggaran). Suatu pekerjaan dinilai efisien apabila sumber daya (input) yang digunakan sedikit, namun mampu menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan rencana atau harapan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi, data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa skor kinerja BRPPUPP Tahun 2025 adalah sebesar 113,15%, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 99,85%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut telah menghasilkan efisiensi sebesar 13,3% yang didapatkan dari selisih nilai pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah diserap untuk mencapai kinerja.

Kondisi ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

1. Terdapat beberapa output dengan pencapaian sama dengan atau lebih besar dari 100%, seperti:
 - A. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok) dengan capaian di Tahun 2025 sebanyak 3.711 Kelompok dengan target sebanyak 3.430 Kelompok dengan persentase sebesar 108,19%
 - B. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 160 kelompok dari target Tahun 2025 sebanyak 149 kelompok dengan persentase sebesar 107,38%.
 - C. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai 465 kelompok dari target Tahun 2025 sebanyak 442 kelompok dengan persentase sebesar 105,20%.
 - D. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP BRPPUPP (Unit) tercapai sebanyak 36 Unit dengan target 28 Unit dan persentase sebesar 120%

- E. Nilai PNB Satker BRPPUPP (Rupiah Miliar) tercapai 0,0413 (0,04 di aplikasi kinerjaku) dari target Tahun 2025 sebesar 0,0399 dengan persentase sebesar 103,54%.
- F. Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket) memiliki capaian sebanyak 2 paket dengan target di Tahun 2025 sebanyak 1 paket dengan persentase 120%.
- G. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang) di Tahun 2025 mempunyai capaian sebanyak 3 orang yang lulus penilaian kompetensi dari target 2 orang di Tahun 2025 dengan persentase sebesar 120%.
- H. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang) di Tahun 2025 mempunyai capaian sebanyak 23 orang yang lulus pelatihan teknis dari target 19 orang di Tahun 2025 dengan persentase sebesar 120%.
- I. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPPUPP (Dokumen) di Tahun 2025 mendapat capaian sebanyak 2 kemitraan dari target sebanyak 1 kemitraan dengan persentase 120%.
- J. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target sebesar 85% dengan persentase capaian 117,65%.
- K. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai) tercapai sebesar 99,72 dengan target di Tahun 2025 sebesar 92 dengan persentase sebanyak 108,39%.
- L. Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai) tercapai dengan nilai 84,40 dari target yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar 80 dan persentase capaian 105,50%
- M. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai) tercapai sebesar 100 dari target yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar 71,5 dan persentase capaian 120%
- N. Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks) tercapai sebesar 83,35 dengan target Tahun 2025 sebesar 81 dan persentase capaian sebesar 102,90%
- O. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 80% dengan persentase capaian 120%.
- P. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 80% dengan persentase capaian 120%.

BAB IV

PENUTUP

01

CAPAIAN KINERJA UTAMA

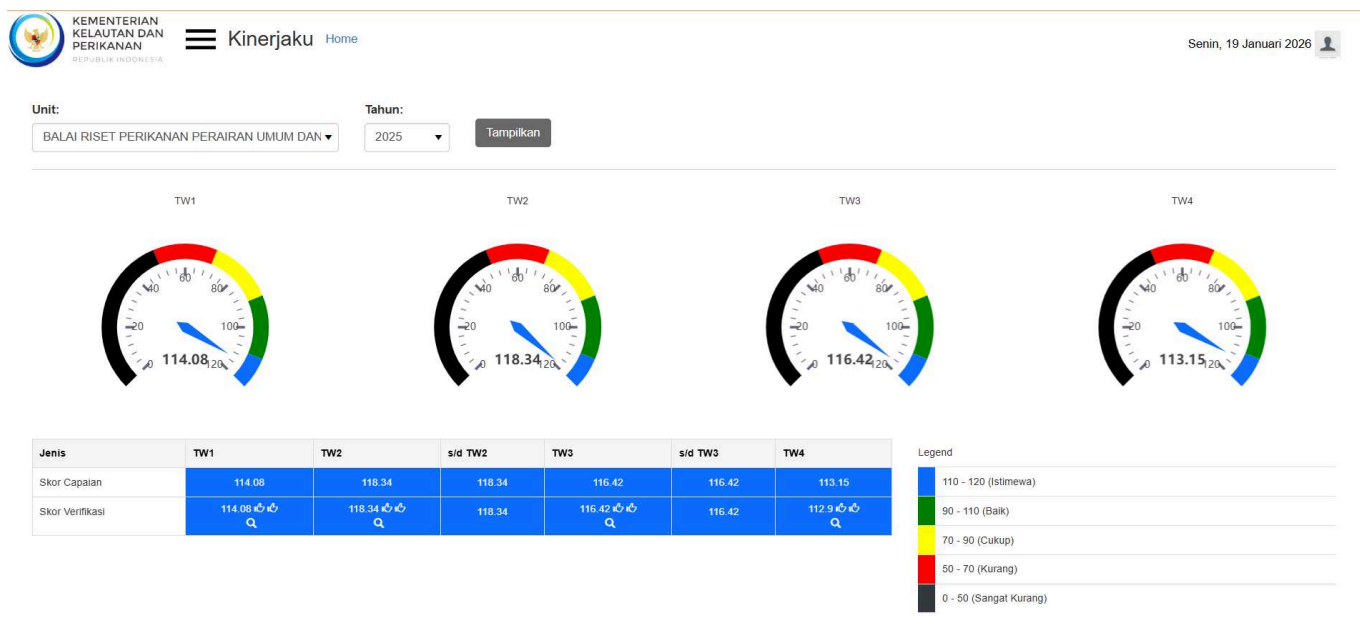
02

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

BAB IV PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Tahun 2025 sebesar 113,15%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerja Tahun 2025 BRPPUPP

Pada Tahun 2025 dari 16 IKU terdapat 9 IKU BRPPUPP berstatus biru dan 7 IKU berwarna hijau, IKU yang telah ada capaiannya adalah:

1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok) dengan capaian di Tahun 2025 sebanyak 3.711 Kelompok dengan target sebanyak 3.430 Kelompok dengan persentase sebesar 108,19%
2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 160 kelompok dari target Tahun 2025 sebanyak 149 kelompok dengan persentase sebesar 107,38%.
3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai 465 kelompok dari target Tahun 2025 sebanyak 442 kelompok dengan persentase sebesar 105,20%.

4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP BRPPUPP (Unit) tercapai sebanyak 36 Unit dengan target 28 Unit dan persentase sebesar 120%
5. Nilai PNPB Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar) tercapai 0,0413 (0,04 di aplikasi kinerjaku) dari target Tahun 2025 sebesar 0,0399 dengan persentase sebesar 103,54%.
6. Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket) memiliki capaian sebanyak 2 paket dengan target di Tahun 2025 sebanyak 1 paket dengan persentase 120%.
7. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang) di Tahun 2025 mempunyai capaian sebanyak 3 orang yang lulus penilaian kompetensi dari target 2 orang di Tahun 2025 dengan persentase sebesar 120%.
8. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang) di Tahun 2025 mempunyai capaian sebanyak 23 orang yang lulus pelatihan teknis dari target 19 orang di Tahun 2025 dengan persentase sebesar 120%.
9. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPPUPP (Dokumen) di Tahun 2025 mendapat capaian sebanyak 2 kemitraan dari target sebanyak 1 kemitraan dengan persentase 120%.
10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target sebesar 85% dengan persentase capaian 117,65%.
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai) tercapai sebesar 99,72 dengan target di Tahun 2025 sebesar 92 dengan persentase sebanyak 108,39%.
12. Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai) tercapai dengan nilai 84,40 dari target yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar 80 dan persentase capaian 105,50%
13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai) tercapai sebesar 100 dari target yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar 71,5 dan persentase capaian 120%
14. Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks) tercapai sebesar 83,35 dengan target Tahun 2025 sebesar 81 dan persentase capaian sebesar 102,90%
15. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 80% dengan persentase capaian 120%.
16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 80% dengan persentase capaian 120%.

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan yang terjadi pada Tahun 2025 yaitu:

1. Masih ada piagam kelompok disuluh yang belum melakukan konversi nilai kelas kelompok.
2. Proses pencapaian IKU Kelompok yang ditingkatkan kelas cenderung membutuhkan waktu yang tidak singkat dan proses yang panjang karena melibatkan banyak pihak.

Secara umum Kinerja BRPPUPP pada Tahun 2025 berjalan dengan baik, namun demikian untuk memastikan capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal pada triwulan berikutnya perlu dilakukan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Indikator kinerja dengan capaian lebih dari 100% agar tetap dipertahankan capaiannya dengan melakukan monitoring agar tidak terjadi penurunan pada tahun berikutnya.
2. Menginventarisir calon kelompok yang akan ditingkatkan serta pengembangan Kompetensi dan Mindset Kelompok supaya lebih mandiri

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPPUPP. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPPUPP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkup BRPPUPP.

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah BRPPUPP ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



LAMPIRAN



Lampiran 1

PK BRPPUPP-PUSLUH KP 27 Januari 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**

Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan

Rezki Antoni S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	4.048
		2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	149
		3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	453
		4	Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	0,0412
		5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit)	28
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	14
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	10
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	9	Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)	1
		10	Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit)	1
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)	1
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	92
		14	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	80
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	71,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16 Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	81
		17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80
		18 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	80

Data Anggaran

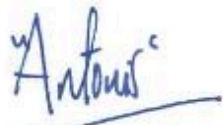
NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.546.805.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	72.241.324.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan		75.788.129.000

Jakarta, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan


Rezki Antoni S

Lampiran 2

PK BRPPUPP-PUSLUH KP 14 April 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL hrsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**

Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 April 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan

Rezki Antoni S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	4.048
		2 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	149
		3 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	453
		4 Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	0,0412
		5 Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit)	28
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6 Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7 Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	14
		8 Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	10
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	9 Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)	1
		10 Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit)	1
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)	1
		12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	92
		14 Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	80
		15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	71,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	81
		17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80
		18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.016.052.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM KP	72.241.324.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan		75.257.376.000

Jakarta, 14 April 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan



Rezki Antoni S

Lampiran 3

PK BRPPUPP-PUSLUH KP 11 Desember 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**

Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rezki Antoni S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BRPPUPP (Kelompok)	3.430
		2 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	149
		3 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	442
		4 Gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP di BRPPUPP (Unit)	28
		5 Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	0,0399
		6 Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	1
		7 Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	2
		8 Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	19
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPPUPP (Dokumen)	1
		10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85
		11 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	92
		12 Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	80
		13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	71,5
		14 Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	81
		15 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80
		16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.912.400.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM KP	76.436.279.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan		79.348.679.000

Jakarta, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rezki Antoni S

Lampiran 4

SP tim Penyusun Pengelola Kinerja BRPPUPP Tahun 2025.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI NOMOR 08, JAKABARING-PALEMBANG

TELEPON: (0711) 5649600 FAKSIMILE (0711) 5469601

LAMAN: www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK persuratanbrppupp@kkp.go.id

**SURAT PERINTAH
KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
NOMOR : B.134/BRPPUPP/TU.110/I/2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN KINERJA
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Institusi Pemerintah (SAKIP) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan tentang Tim Pengelolaan Kinerja di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694);

MEMBERI PERINTAH

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini;

KEDUA : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

Tim Pengelola Kinerja BRPPUPP Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Balai Riset Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
- b. Pelaksana
 1. Ketua:
Memimpin Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi di lingkungan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 2. Manajer Kinerja:
Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;
 3. Sub-Tim Perencanaan Kinerja, memastikan bahwa:
 - a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat:
 - 1) visi, misi, dan program;
 - 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
 - 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan; dan
 - 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - b. Indikator Kinerja:
 - 1) Digunakan sebagai ukuran kinerja formal;

- 2) Indikator kinerja eselon III telah selaras dengan IKU Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 3) Indikator kinerja memenuhi kriteria SMART- C; dan
- 4) Ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
- c. Dokumen Kontrak Kinerja:
 - 1) Perjanjian Kinerja (PK):
 - a) Tersusun selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
 - b) memuat target kinerja, digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) Peta Strategis;
 - 3) Rincian Target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; dan
 - 4) Inisiatif Strategis/Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.
- d. Rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
- e. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada Balai Riset Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
4. Sub-Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/Verifikasi:
 - a. Menyusun pedoman/mechanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan);
 - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan);

- f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan diunggah ke dalam laman resmi;
 - i. Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - j. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - k. Menyusun laporan nilai evaluasi kinerja yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - l. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;
 - n. Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - o. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
 - p. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
 - q. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
 - r. Memastikan seluruh rekaman data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan terdokumentasi dengan baik; dan
 - s. Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
5. Sub-Tim Kinerja Pegawai:
- a. Menyelaraskan indikator kinerja pegawai dengan indikator kinerja organisasi;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawai;

- c. Memastikan adanya integrasi sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan sistem pengelolaan kinerja organisasi;
- d. Memastikan penerapan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) berbasis kinerja pada setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang dan berkala di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

- KETIGA** : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT** : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Penyuluhan KP;
- KELIMA** : Masa kerja Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
 Pada Tanggal, 10 Januari 2025
 Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan



Rezki Antoni S, S.Kel
 NIP. 19850619 201012 1 001

Lampiran : Surat Perintah Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan
Nomor : B.134/BRPPUPP/TU.110/I/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KINERJA
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

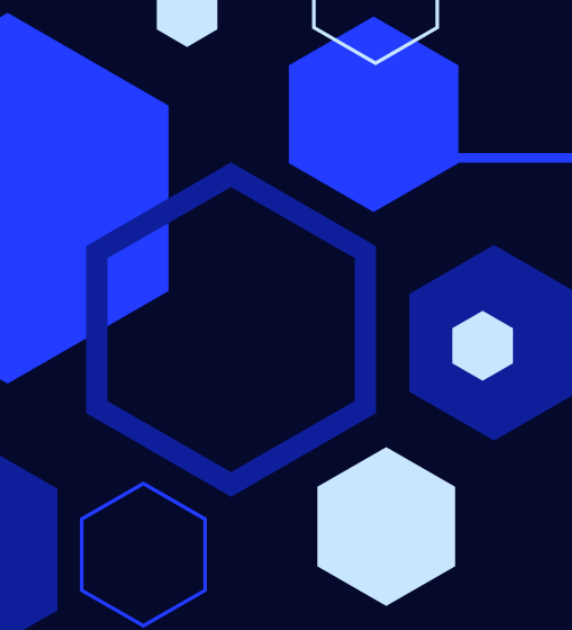
Pengarah : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
Penanggung Jawab :

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
Manajer Teknis		
1.	Rezki Antoni S	Manajer
2.	Rully Ismanto	Manajer
3.	Sri Mulyani	Manajer
Sub Tim Perencanaan Kinerja		
1.	Acim Tirtana	Perencana
2.	Lisnawati	Perencana
3	Rian Ariadi Harahap	Perencana
Sub Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/Verifikasi		
1.	Muthia Nurlestari Putri	Pelaksana
2.	Arismansyah	Pelaksana

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 10 Januari 2025
Kepala Balai Riset Perikanan
Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan



Rezki Antoni S. S, Kel
NIP. 19850619 201012 1 001



Terima kasih

BRPPUPP PALEMBANG



(0711) 5649600



www.kkp.go.id/brsdm/brppupalembang



persuratanbrppupp@gmail.com



[bppsdm_brppupp.palembang](https://www.instagram.com/bppsdm_brppupp.palembang)

